

**KEPENTINGAN EKONOMI UNI EMIRAT ARAB (UEA) TERHADAP
PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK UEA-ISRAEL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

REZKY AMALIA RUSTAM

E061181030

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEPENTINGAN EKONOMI UNI EMIRAT ARAB (UEA)
TERHADAP PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK UEA-
ISRAEL

N A M A : REZKY AMALIA RUSTAM

N I M : E061181030

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 13 Desember 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEPENTINGAN EKONOMI UNI EMIRAT ARAB (UEA)
TERHADAP PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK UEA-
ISRAEL

N A M A : REZKY AMALIA RUSTAM

N I M : E061181030

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 13 Desember 2022.



Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Seniwati

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.....

Abdul Razaq Z Cangara

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

Dr. H. Husain Abdullah

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Ishaq Rahman

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

Aswin Baharuddin

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezky Amalia Rustam

NIM : E061181030

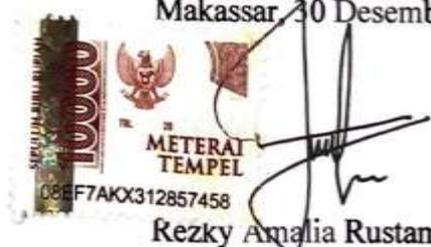
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Kepentingan Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) Terhadap Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Desember 2022



METERAL
TEMPEL
088F7AKX312857458
Rezky Amalia Rustam

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul “Kepentingan Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) Terhadap Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik serta saran yang membangun dari para pembaca tentunya sangat diperlukan agar kedepannya penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik. Skripsi ini disusun dengan baik berkat bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dr. Phill. Sukri, M.Si. dan seluruh staf fakultas.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.
4. Ibu Seniwati, PhD. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP.MSi selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Drs. Patrice Lumumba, MA., Drs. H.M. Imran Hanafi, MA.,M.Ec., Drs. Aspianor Masrie, M.Si, Dra St. Nurcahaya, Sm, Hk. M.Si, Dr. Adi Suryadi B., MA., Drs. H. Husein Abdullah, M.Si., Dra. Srie Honora Ramli, M.A., Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Burhanuddin,S.IP, M.Si., Agussalim, S.IP., MIRAP., Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Nur isdah, S.IP., MA., Nurjannah Abdullah, S.IP.,MA., Bama Andika Putra, S.IP., MIR., Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR Sebagai Dosen Dapartemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberi ilmu dan juga pengalaman yang berharga
6. Kedua oangtua (Bapak Rustam Mursali & Ibu Syamsiah Baji), serta kakak (Suhartina Rustam) & adik (Tri Abid Rustam) yang selalu memberikan dukungan moril tiada henti-hentinya.
7. Al fitrah Ary Suci, Raisa Ahdia, Nurul Paradillah, Elsa Mardani, Luthfania Andriani, Asrya Yunisa, Nurnaningsih Al Hasmi, Rhin Khaerina Rahmat, Isty As'ad dan seluruh Teman-teman mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan berkontribusi besar dalam penyusunan skripsi.
8. Rahyuni, Sri Putri Amalia, Tuthy Tazkiah Mustari, Wardah Wahyuni, Ihdiyani Rezky Aulia, Dela Dwi Ayu Ramadhani, Nurul Fadhillah HM, Nurul Halimah S, Sahrianti dan semua teman-teman HEXO, Bolang Crew,

Hipermata, Adwindo Takalar, dan rekan-rekan PMMB PT Semen Tonasa yang selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

9. Terakhir, untuk diriku sendiri (Rezky Amalia Rustam). Terima kasih telah sabar dalam semua prosesnya, kedepannya dijaga terus semangatnya. Kamu hebat.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tak hanya kepada para penulis, tetapi kepada para pembaca.

ABSTRAK

Rezky Amalia Rustam (E061181030), “Kepentingan Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) Terhadap Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel”, dibawah bimbingan **Seniwati, PhD.** selaku dosen Pembimbing I dan **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP.MSi** selaku dosen Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan-kepentingan ekonomi yang melandasi UEA sehingga melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel pada 13 Agustus 2020. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya serta tantangan dan hambatan UEA dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah Pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, dan pernyataan tokoh resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UEA memiliki beberapa kepentingan ekonomi terhadap Israel yang dapat diklasifikasikan menjadi kepentingan ekonomi dalam faktor internal dan eksternal, seperti; Kepentingan ekspor impor, Kepentingan investasi dalam negeri (*Inbound FDI*), Kepentingan investasi luar negeri (*Outbond FDI*), dan Kepentingan pemasaran barang dan jasa internasional. Adapun dalam penelitian ini, Penulis menemukan bahwa tak hanya pemerintah UEA, sektor swasta kedua negara juga mendapat keuntungan dari pembukaan hubungan diplomatik UEA-Israel.

Kata Kunci: Ekonomi Politik Internasional, Kebijakan Ekonomi Luar Negeri, Uni Emirat Arab, Israel

ABSTRACT

Rezky Amalia Rustam (E061181030), “Kepentingan Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) Terhadap Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel” *under the guidance of Seniwati, PhD as the first advisor, and Abdul Razaq Z. Cangara, as the second advisor at Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

The purpose of the study is to determine the economic interests that underlie UAE to open diplomatic relations with Israel on August 13, 2020. In addition, this study also aims to find out the forms of efforts as well as the challenges and obstacles of the UAE in establishing relations with Israel. The research method used in this thesis is a descriptive method, with data collection techniques in the form of literature review from various literature such as books, journals, documents, articles, and official and recognized statements, as well as reports related to this research.

The results of this study indicate that the UAE has several economic interests towards Israel which can be classified into economic interests in internal and external factors, such as; Import export interests, domestic investment interests (Inbound FDI), foreign investment interests (Outbound FDI), and international goods and services marketing interests. In this study, the authors found that not only the UAE government, the private sector of the two countries, also benefited from the opening of UAE-Israel relations.

Keywords: International Political Economy, Foreign Economic Policy, United Arab Emirates, Israel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR`	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.1 Konsep Ekonomi Politik Internasional	10
1.4.2 Konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri	22
1.4.3 Operasionalisasi Variabel.....	28
1.5 Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
2.1 Konsep Ekonomi Politik Internasional	32
2.2 Konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri.....	39
2.3 Penelitian Terdahulu	49
BAB III GAMBARAN UMUM	58
3.1 Dinamika Hubungan UEA di Kawasan Timur Tengah.....	58
3.2 Dinamika Hubungan Israel di Kawasan Timur Tengah.....	63
3.3 Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel	68
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Kepentingan Ekonomi Dalam Faktor Internal	79

4.2 Kepentingan Ekonomi dalam Faktor Eksternal.....	98
4.3 Bentuk-Bentuk Upaya UEA Dalam Mewujudkan Kepentingan Ekonomi Nasionalnya Terhadap Israel	107
4.4 Tantangan dan Hambatan yang dihadapi UEA Mencapai Kepentingan Ekonominya Terhadap Israel	118
4.4.1 Tantangan dan Hambatan dalam Faktor Internal.....	120
4.4.2 Tantangan dan Hambatan dalam Faktor Eksternal	122
BAB V PENUTUP.....	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Konsep Pemasaran Internasional	21
Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3.1 Profil Negara UEA.....	60
Tabel 3.2 Urutan Negara Arab Terkaya tahun 2020-2021	61
Tabel 3.3 Negara Pengekspor Teknologi Canggih di Timur Tengah.....	66
Tabel 3.4 Perbedaan Kapasitas Negara UEA dan Israel	75
Tabel 4.1 Jenis Produk Israel yang Paling diminati UEA.....	85
Tabel 4.2 Bentuk-Bentuk Upaya	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pola Relasi UEA-Timur Tengah	3
Gambar 1.2 PDB perkapita Israel dari tahun 2012 – 2022.....	6
Gambar 3.1 Burj Khalifah (Gedung Pencakar Langit Tertinggi) Di dunia.....	58
Gambar 3.2 Perwakilan Anggota Liga Arab Saat Konferensi Tingkat Tinggi di Arab Saudi	62
Gambar 3.3 Peta Kawasan Israel.....	64
Gambar 3.4 PDB Perkapita Israel dari tahun 2012-2022.....	65
Gambar 3.5 UEA dan Israel Menandatangani Kesepakatan Normalisasi Hubungan di Gedung Putih AS	69
Gambar 3.6 Kedutaan Besar UEA di Tel Aviv, Israel	73
Gambar 4.1 Daftar produk Impor UEA dari Israel	81
Gambar 4.2 Daftar produk Ekspor UEA ke Israel	81
Gambar 4.3 Penandatanganan Kesepakatan Perdagangan Bebas oleh Menteri ekonomi Israel Orna Berbivai dan Menkeu UEA Abdulla bin Touq al-Marri.....	83
Gambar 4.4 Anggota Dewan <i>Catalyst Fund Luc Muller</i> Israel, Edouard Cukierman, Hamed Ahmed Ali, dan Dr. Laurent Choppe, mitra pengelola Cukierman yang Membahas Peluang investasi di sektor pangan UEA-Israel.....	93
Gambar 4.5 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan dan Menlu Bahrain, Abdullatif al-Zayani di Gedung Putih	100
Gambar 4.6 Daftar Negara Teratas dari Penyebaran Entitas Yahudi.....	105
Gambar 4.7 Data Pemasaran Internasional UEA	105
Gambar 4.8 Aksi Unjuk Rasa Masyarakat UEA yang Kontra Terhadap Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel	120
Gambar 4.9 Serangan Udara Kelompok Houthi yang Meledakkan	

Tangki Bahan Bakar UEA	125
Gambar 4.10 Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Palestina dalam Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel.....	127

BAB IS

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

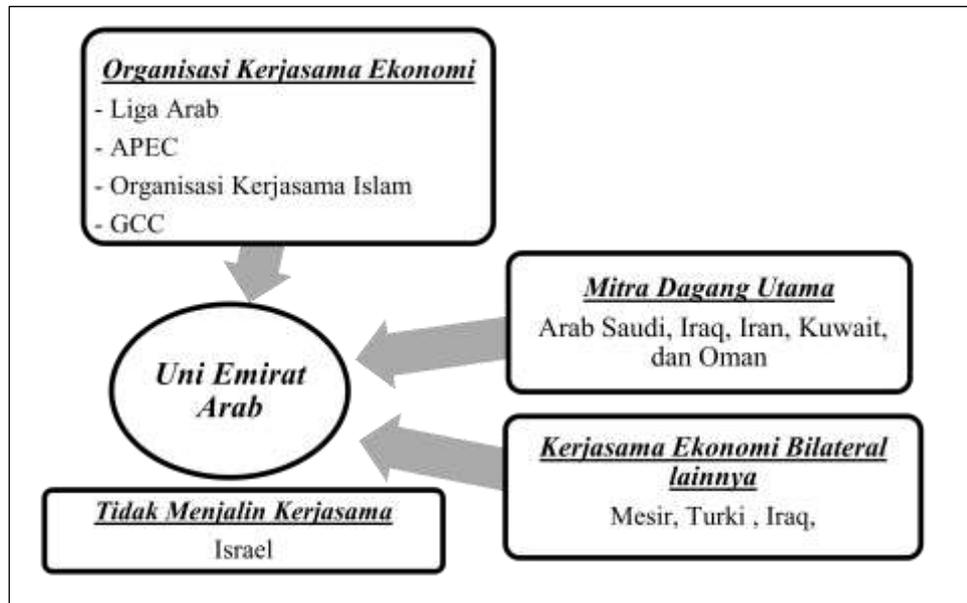
Derasnya arus globalisasi saat ini membuat transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara semakin terkoneksi. Uni Emirat Arab atau UEA yang merupakan negara federasi di kawasan Timur Tengah pun mencoba untuk *survive* dengan terus meningkatkan perekonomiannya dengan berbagai kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Sebelumnya negara yang dijuluki “sparta kecil” ini menggantungkan perekonomiannya pada ekonomi sederhana yang meliputi sektor pertanian nomaden, perikanan, pelayaran, budidaya tanaman kurma dan industri Mutiara (Ghafur, 2019). Namun setelah ditemukan cadangan minyak di tahun 1930, UEA seolah memperoleh kekuatan ekonomi yang dapat memajukan negaranya.

Dari penemuan cadangan minyak tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) UEA terus mengalami peningkatan hingga 263 kali lipat dalam waktu singkat, yang awalnya 6.5 miliar dirham UEA (AED) pada tahun 1971 menjadi 1.540 miliar UEA (AED) pada tahun 2014. Diperkirakan UEA memiliki cadangan minyak sebesar 97.8 miliar barel atau sekitar 4% cadangan minyak dunia serta gas bumi sebesar 215 Triliun kaki kubik atau 3.5 cadangan gas bumi. Besarnya kekayaan migas menjadikan UEA menempati posisi ke 7 sebagai negara penghasil gas alam dan cadangan minyak terbesar di dunia (Ghafur, 2019). Dari kekayaan sector minyak ini juga UEA telah dipandang sebagai kekuatan ekonomi di Kawasan Timur Tengah.

Kendati demikian, UEA kemudian menyadari bahwa cadangan minyak yang mulai menipis dan harga minyak yang semakin tinggi akan membawa malapetaka pada perekonomian negaranya jika hanya terus bergantung pada satu komoditas (Zacky, 2021). Sehingga untuk mengurangi kebergantungan terhadap sektor migas, pemerintah UEA kemudian mengusung kebijakan liberalisasi dan diversifikasi ekonomi yang ditandai dengan kebijakan terobosan UEA atau Visi Abu Dhabi 2030. Visi tersebut memuat rencana strategis untuk meningkatkan sektor-sektor ekonomi potensial lain UEA dengan penerepan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dengan negara lain.

Adapun beberapa organisasi Internasional yang telah diikuti UEA di regional Timur Tengah untuk menunjang sektor perekonomiannya, meliputi: Liga Arab, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Selain itu, UEA juga turut membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia serta beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Hingga tahun 2019, terdapat lima negara yang menjadi mitra utama dalam perdagangan luar negeri UEA seperti, Arab Saudi, Iraq, Iran, Kuwait, dan Oman. Di sektor lain UEA juga terlihat telah menancapkan investasi dengan Mesir, Turki, Iraq dan beberapa negara lainnya (Global Edge, 2022). Dari penjelasan terkait hubungan Ekonomi Uni Emirat Arab dengan negara di kawasan Timur Tengah yang terdiri dari, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Turki, Kuwait, Israel, Mesir, Yaman, Suriah, Lebanon, Yordania, Oman, Libya, Irak, Iran, Maroko, Tunisia, Al jazair, Azerbaijan, dan UEA. Maka dapat

digambarkan dinamika pola relasi yang terjadi dalam rentan waktu 2009 – 2019 pada diagram dibawah ini:



Gambar 1.1. Pola relasi hubungan bilateral ekonomi UEA-Timur Tengah
Sumber: Diolah oleh penulis

Dari pola relasi yang terbentuk, dapat dilihat bahwa UEA sebagai salah satu negara di kawasan Timur Tengah telah membuka banyak hubungan diplomatik dan bekerjasama dengan negara-negara tetangganya dalam bidang ekonomi. Pola relasi yang tertuang dalam bentuk kerjasama multilateral seperti Liga Arab, APEC, dan OKI merupakan bentuk hubungan antara UEA dengan dua negara atau lebih guna mencapai kepentingan ekonomi bersama (Global Edge, 2022). Selain itu, terdapat pula kerjasama bilateral lainnya yang tertuang dalam bentuk investasi, ekspor impor, dan perdagangan bilateral lainnya,

Namun terdapat satu negara, yakni Israel yang dalam rentan tahun 2009-2019 terlihat belum melakukan kerjasama apapun baik dalam skala bilateral maupun multilateral dengan UEA, yakni Israel. Sejak berdirinya Israel di Timur Tengah, sebagian besar negara Arab termasuk UEA telah mengutuk dan

bersepakat untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Bahkan saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1948, beberapa negara Arab seperti Yordania, Mesir, Suriah, dan Irak tak henti-hentinya memberikan serangan kepada Isarael yang berujung peperangan (Matanasi, 2022). Presiden pertama UEA, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, juga pernah menegaskan dalam surat kabar Akhbar *al-Youm* bahwa:

“Israel’s policy of expansion and racist plans of Zionism are directed against all Arab countries, and in particular those which are rich in natural resources. No Arab country is safe from the perils of the battle with Zionism unless it plays its role and bears its responsibilities in confronting the Israeli enemy”.

Peristiwa ini menandakan bahwa sebelumnya tidak ada peluang antara UEA-Israel untuk melakukan hubungan diplomatik yang dapat membawa kedua negara terlibat dalam kerjasama bidang ekonomi. Namun baru-baru ini publik dikejutkan dengan kebijakan luar negeri UEA yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut turut menjadikan UEA sebagai negara ketiga setelah Yordania dan Mesir di wilayah Timur Tengah yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel (Muhammad S, 2020). Pembukaan hubungan diplomatik yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2020 menandakan bahwa akan adanya permulaan kerjasama oleh kedua negara yang sebelumnya memiliki sejarah yang rumit. Berbeda dengan negara lain yang menjalin hubungan dengan UEA, pembukaan hubungan diplomatik yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donal Trump justru mengundang banyak kritikan dari berbagai pihak karena dinilai dapat mengesampingkan sejarah dan melemahkan solidaritasnya dengan negara Arab.

Walapun demikian, saat ini UEA telah menjadi negara pertama di Kawasan Teluk yang membuka kedutaan besar di negara Israel. Perdana Menteri Abu Dhabi, Bennett, mengatakan bahwa dalam kesempatan kerjasama ini, UEA akan memanfaatkan kesempatan dan memperdalam kerja sama khususnya dalam bidang ekonomi (Wicaksono, 2020). Pembukaan hubungan diplomatik UEA-Israel merupakan terobosan baru untuk menunjang visi Abu Dhabi 2030 dan rencana diversifikasi ekonomi UEA untuk menjadi negara maju di dunia, UEA percaya bahwa dengan berkolaborasi bersama Israel yang saat ini dapat membantu dalam mencapai kepentingan ekonominya.

Israel merupakan negara yang cukup berpengaruh di dunia dalam beberapa sektor. Tak hanya UEA yang kerap menjadi negara pencetak rekor-rekor dunia, dalam beberapa sektor Israel juga mampu menjadi negara berprestasi yang menciptakan inovasi baru dunia seperti: memiliki gelar universitas tertinggi di dunia perkapita, negara terkemuka untuk daur ulang 90% air limbah, dan negara yang menghasilkan teknologi canggih (Blackburn, 2021). Secara ekonomi, Israel telah masuk dalam kategori negara dengan ekonomi yang inovatif bersama negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Finlandia, Swedia, Jerman, Swiss, Singapura, Jepang, Denmark. Sementara di kawasan Timur Tengah ia menduduki peringkat pertama kekuatan ekonomi paling inovatif yang disusul Qatar, Arab Saudi, dan UEA (Basari, 2019). Berikut data PDB Israel yang dirilis oleh *World Bank* sejak tahun 2012 hingga 2022:



Gambar 1.2 PDB perkapita Israel dari tahun 2012 - 2022
 Sumber: World Bank dari tradingeconomics.com, 2022

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Israel merupakan negara yang maju dalam sektor perekonomian global dengan PDB perkapita yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak ditemukan gas alam di lepas Pantai Mediterania terutama di ladang gas Tamar dan Leviathan, Israel telah mendapat keuntungan peningkaan ekonomi yang menjadikannya sebagai pusat pasar gas alam regional (Basari, 2019). Selain itu, Israel menganut ekonomi yang berbasis pasar bebas dan dikenal memperoleh pendapatan lainnya dari industri-industri berteknologi tinggi yang kerap diekspor ke negara lain.

Berdasarkan pemaparan dari fakta-fakta diatas, bisa dikatakan bahwa kekuatan ekonomi dan teknologi Israel secara tidak langsung telah membuatnya dipandang sebagai negara yang ideal dan startegis untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan UEA (Global Edge, 2022). Sehingga dalam pembukaan hubungan diplomatik yang difasilitasi Presiden Donal Trump dalam perjanjian "*Abraham Accords*" atau kesepakatan perdamaian UEA-Israel juga telah mempertegas relasi ekonomi yang nantinya akan dibangun kedua negara.

Abraham Accords sebagai sebuah kebijakan juga terlihat telah memfasilitasi kerjasama ekonomi UEA-Israel dalam bidang keuangan dan investasi bilateral. Dimana ditekankan bahwa kebijakan ini akan memberi regulasi untuk melindungi investor, konsumen, pasar integritas dan stabilitas keuangan, serta menjaga semua standar peraturan yang berlaku dalam kerjasama UEA-Israel dalam bidang ekonomi guna memperdalam dan memperluas hubungan kerjasama ekonomi yang nantinya akan dibangun kedua negara (Muhammad S, 2020). Sehingga dalam hal ini, penelitian akan berfokus melihat kepentingan-kepentingan dalam bidang ekonomi yang melatarbelakangi UEA untuk membuka hubungan diplomatik dengan Isarel dengan mengangkat judul **KEPENTINGAN EKONOMI UNI EMIRAT ARAB (UEA) TERHADAP PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK UEA-ISRAEL.**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan Uni Emirat Arab terhadap pembukaan hubungan diplomatik UEA-Israel ditahun 2020. Penulis juga akan membandingkan kebijakan ekonomi luar negeri UEA terhadap Israel sebelum dan sesudah melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan membatasi penelitian ditahun 2009-2019, alasan penulis memilih rentan tahun tersebut dikarenakan berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dalam rentan waktu tersebut sebelumnya tidak terdapat kebijakan yang dapat membuat UEA terlibat dalam kerjasama ekonomi dengan Israel. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan ekonomi UEA terhadap Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel?
2. Bagaimana bentuk-bentuk upaya UEA dalam mewujudkan Kepentingan Ekonomi Nasionalnya Dalam Pembukaan Hubungan Diplomatiknya Terhadap Israel?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi UEA dalam mencapai kepentingan ekonominya terhadap Israel?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, yakni:

1. Mengetahui kepentingan ekonomi UEA dalam pembukaan hubungan diplomatik UEA-Israel.
2. Mengetahui Bentuk-bentuk upaya UEA Dalam Mewujudkan Kepentingan Ekonomi Nasionalnya Dalam Pembukaan Hubungan Diplomatiknya terhadap Israel?
3. Menganalisis bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi UEA dalam mencapai kepentingan ekonominya terhadap Israel?

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dijabarkan sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan informasi yang bermanfaat bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kepada Mahasiswa/i yang memiliki ketertarikan melihat perkembangan

regional di Kawasan Timur Tengah.

2. Diharapkan dapat menjadi acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis terjadinya suatu pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara serta kepentingan-kepentingan ekonomi yang turut melatarbelakangi.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan bagi setiap individu, organisasi, pemerintah, dan aktor-aktor dalam hubungan internasional yang memiliki ketertarikan terhadap topik yang diteliti penulis.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua konsep yakni, Konsep Ekonomi Politik Internasional dan Konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri. Konsep-konsep tersebut akan digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis data yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kebijakan luar negeri adalah sebuah istilah yang merujuk terhadap strategi atau perilaku yang dilakukan suatu negara dalam menjalin interaksi dengan negara lain. Ini mengacu terhadap akumulasi dari berbagai tujuan negara atau yang disebut dengan kepentingan nasional yang hendak dicapai (Gimba & Ibrahim Sheriff, 2021). Berikut uraian relevansi konsep yang dimuat dalam penelitian ini:

1.4.1 Konsep Ekonomi Politik Internasional

Saat ini ditengah arus globalisasi, sektor ekonomi seakan menjadi hal fundamental yang menjadi acuan dalam pemenuhan kepentingan nasional suatu negara. Sederhananya, dengan ekonomi yang terpenuhi, terdapat banyak aspek

yang dapat ditopang dalam pembangunan negara seperti, memberi kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan produk dalam negeri, menghindari ketimpangan dan kemiskinan serta menunjang power negara di area internasional (Mursitama, 2020). Dalam konsep ekonomi politik internasional, ekonomi dapat didefinisikan sebagai sistem dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Sementara Politik menyangkut seperangkat institusi dan aturan yang mengatur interaksi sosial kita.

Studi tentang ekonomi politik ini berawal pada abad ke 18, dimana pencetusnya yakni Adam Smith, John Stuart Mill dan Karl Marx memberi penekanan bahwa politik dan ekonomi merupakan hal yang tidak beroperasi di bidang yang terpisah, tetapi saling terkait erat (Eckhardt, 2019). Ekonomi politik internasional tidak terlepas dari kebijakan negara dan pengaruh dari kekuatan-kekuatan di luar negara seperti individu, kelas sosial, serta kelompok kuat dalam struktur ekonomi masyarakat. Sehingga ekonomi politik internasional lebih detailnya dapat diartikan sebagai kajian yang mengaitkan kekuatan ekonomi dan kekuatan politik dalam mengalokasikan sumber daya suatu negara.

Adam Smith mendefinisikan ekonomi politik internasional sebagai *“branch of science of a statesman or legislator”* serta menjadi acuan dalam pengaturan ekonomi nasional. Sementara Mochtar Mas’oed mendefinisikan bahwa ekonomi politik internasional menitikberatkan kepada studi tentang interaksi serta keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, antara negara dan pasar,

serta antara pemerintah dengan masyarakat (Badiri, 2020). Kedua definisi diatas memberi fokus sentral dalam ekonomi politik internasional sebagai subjek akademik tentang dinamika pertarungan politik yang membentuk kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh negara.

Untuk itu, ekonomi politik internasional tidak terlepas dari pembahasan tentang teori-teori ekonomi, kebijakan-kebijakan domestik, dinamika interaksi politik antar negara serta organisasi-organisasi politik internasional yang terlibat. Kemudian salah satu hal fundamental dalam ekonomi politik internasional yakni kaitan antara negara dan pasar untuk mencapai peningkatan ekonomi guna menunjang kemakmuran dengan kombinasi sektor politik sebagai upaya pencapaian kekuatan atau kekuasaan menjadikan negara dan pasar dalam level internasional disebutkan sebagai inti dari ekonomi politik internasional (Mursitama, 2020). Secara umum, Oatley membagi empat isu sentral bidang kajian dalam Ekonomi Politik Internasional, yakni sebagai berikut; 1) Sistem Perdagangan Internasional; 2) Sistem Moneter Internasional; 3) Perusahaan Multinasional (MNCs); dan 4) Pembangunan Ekonomi negara. Keempat isu tersebut adalah pembahasan yang saling terkait dalam sistem ekonomi politik internasional dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kepentingan ekonomi nasional suatu negara.

Kepentingan Ekonomi Nasional

Sebagai salah satu bagian dari ekonomi politik internasional, kepentingan ekonomi nasional dapat diklaim sebagai hal fundamental dari perumusan kebijakan luar negeri yang paling efektif. Ini berkorelasi dari besarnya

kontribusi sektor perekonomian dalam memajukan pembangunan ekonomi negaranya sehingga setiap negara didunia pada umumnya mempunyai tujuan nasional yang beorientasi untuk mengembangkan kepentingan ekonomi nasional dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun individu (Eckhardt, 2019). Adapun beberapa instrument dari kepentingan ekonomi nasional yang meliputi kepentingan dalam bidang investasi, ekspor impor, utang luar negeri dan pemasaran barang dan jasa internasional. Berikut adalah penjelasan detail tentang kepentingan ekonomi nasional tersebut:

1) Investasi

Setiap negara membutuhkan modal untuk membiayai proyek pembangunannya. Apabila ternyata persediaan tabungan di dalam negeri tidak tercukupi, maka salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan menarik investasi. Investasi yang kerap dilakukan negara pada umumnya terdiri atas 2 yakni investasi asing langsung dan investasi portofolio, yang akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Investasi Luar Negeri atau FDI

Investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) merupakan bentuk penanaman modal asing suatu negara oleh investor asing baik berasal dari perusahaan atau individu (Nasruddin, 2022b). Adapun cara lain dari penerapan investasi asing langsung/FDI ialah menanamkan investasi di pasar modal, dimana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi.

FDI saat ini diyakini oleh negara-negara menjadi salah satu sumber penting pembiayaan yang dapat memberikan kontribusi besar bagi proses pembangunan suatu negara. Sehingga tak hanya sebatas menjadi kegiatan penanaman modal, tetapi penerapan investasi FDI dapat menjadi aspek pendorong integritas ekonomi internasional yang menciptakan hubungan stabil antara berbagai negara.

Walaupun mekanisme dari FDI melibatkan regulasi dan pengawasan dari banyak pemerintah, yang mengarah ke tingkat risiko politik yang lebih tinggi. Tetapi penerapan FDI memiliki dampak lain yang menguntungkan bagi negara, seperti pada berikut ini; 1) FDI dapat mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, baik di negara penerima maupun di negara yang melakukan investasi. Dengan investasi luar negeri, perusahaan dapat melakukan akuisisi perusahaan pemilik sumber daya di negara yang dituju atau membuka/membuat anak perusahaan yang baru; 2) FDI dapat menjadi sarana untuk bagi perusahaan untuk memperluas produknya ke negara lain; 3) Mencari aset strategis yang tentunya akan membuat sebuah perusahaan memiliki daya saing yang lebih tinggi (Chen, 2020).

(2) Investasi portofolio

Investasi portofolio didefinisikan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan dalam aset yang secara kolektif membentuk portofolio dimana investor melakukan investasi setiap hari dengan membeli obligasi, saham, sertifikat deposito, dan sekuritas lainnya (Surbhi, 2017). Berbeda dengan

FDI yang dalam penerapannya menerapkan regulasi dan jumlah dana yang lebih besar. Investasi portofolio justru mengacu pada bentuk investasi pasif yang dilakukan dalam sekuritas investor yang tidak menawarkan kontrol investor atas badan dalam kegiatan investasi (Maverick, 2022). Oleh karenanya, investasi portofolio dapat dilakukan negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial jangka pendek dan bukan untuk memperoleh kendali yang signifikan atas operasi manajerial perusahaan.

Bentuk investasi terdiri dari inward (investasi dari mancanegara ke dalam negeri) dan outward (investasi ke negara lain). Investasi berawal ketika suatu perusahaan menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke perusahaan di negara lain. Dengan ini perusahaan negara asal (*home country*) bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya. Negara penerima (*host country*) FDI juga berpotensi akan menerima keuntungan yang berdalih transfer teknologi guna mendukung proses produksi, memberikan keterampilan manajerial dengan pelatihan kepada karyawan yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia negara penerima. Laba lain yang dihasilkan oleh kegiatan investasi yakni pajak pendapatan yang dapat berkontribusi bagi perekonomian suatu negara (Mahadiansar et al., 2021). Oleh karena itu, bukan suatu hal yang aneh jika banyak negara yang membuka dirinya untuk membiarkan investor asing melakukan penerapan FDI ke negaranya.

2) Ekspor Impor

Derasnya arus globalisasi saat ini membuat transaksi ekonomi antara satu negara dengan negara semakin terkoneksi. Salah satu indikasi meningkatnya pertumbuhan perekonomian dunia ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor antar satu negara dengan negara lain yang semakin pesat. Ekspor dan impor didefinisikan sebagai wujud perdagangan internasional yang berupa kegiatan transaksi jual beli antara suatu negara dengan negara lain yang dilakukan oleh individu, perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi lain dengan melewati batas negara atas dasar kesepakatan bersama (Abdi, 2022).

Ekspor merupakan sebuah kegiatan menjual produk-produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara yang lain. Ekspor dapat terjadi ketika negara sudah mampu memproduksi barang/jasa dengan jumlah yang besar dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun tujuan kegiatan ekspor bagi suatu negara ini yakni: 1) Menambah devisa negara, menciptakan investasi, dan memperluas pasar dari produk/jasa yang dijual di negara lain; 2) Membuka lapangan pekerjaan baru; 3) Mengendalikan harga produk (CNBC Indonesia, 2022).

Sedangkan impor adalah kegiatan membeli sebuah produk yang berasal dari negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Meskipun diklaim dapat mengurangi devisa negara, tetapi kegiatan impor juga dapat berdampak positif bagi suatu negara, beberapa dampak lain dari kegiatan impor barang/jasa yakni: 1) Memenuhi

kebutuhan dalam negeri dari barang/jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri; 2) Mencegah inflasi atas kelangkaan suatu produk sehingga berdampak menciptakan stabilitas perekonomian; 3) Mendapat teknologi modern; dan 4) Menambah penghasilan negara melalui pajak bea masuk dari negara lain (Idris, 2021a).

Kemajuan suatu negara dapat diukur melalui kegiatan neraca perdagangan ekspor-impor yang berlangsung. Apabila kegiatan ekspor lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat negara tersebut dapat dipastikan sebagai negara dengan pendapatan yang besar dan maju, tetapi sebaliknya apabila kegiatan impor lebih tinggi dari ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan negara tersebut cenderung tergantung dengan negara lainnya dan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lambat.

3) Utang Luar Negeri

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang mutlak dilakukan oleh suatu negara guna meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai proses pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diperoleh oleh tekad kuat dari sumber daya manusia, akan tetapi perlunya ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya modal yang produktif (Junaedi, 2018). Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka negara perlu melakukan upaya dan strategi pembangunan ekonomi nasionalnya yang dapat berorientasi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, seperti memperbaiki kualitas SDM dan mendatangkan sumberdaya modal ekonomi dari negara lain.

Serangkaian kebijakan baik berupa stimulus dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal) penting dilakukan oleh suatu negara. Dengan globalisasi perekonomian dunia yang pesat, modal asing telah dianggap sebagai katalisator pembangunan ekonomi suatu negara. Baik individu, perusahaan atau negara secara kelembagaan saat ini tak pernah lepas dari praktik utang-piutang. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Kegiatan utang-piutang sudah dianggap sebagai hal lazim yang dapat menambah modal tata kelola suatu negara. Bahkan semua negara, tercatat pernah mempraktikkan utang luar negeri (Junaedi, 2018). Oleh karenanya, utang juga dianggap sebagai sumber pembiayaan proyek pembangunan yang efektif bagi negara-negara.

Definisi utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan utang yang diperoleh pemerintah negara melalui *development partner* atau pemberi pinjaman luar negeri dengan persyaratan tertentu dan harus dibayar kembali. Pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan menjadi dua, yakni: *Multilateral*, atau suatu lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara yang memberikan pinjaman kepada suatu negara. *Bilateral*, atau pemerintah negara asing atau sebuah lembaga dari negara asing yang memberikan pinjaman kepada suatu negara (Rochman, 2019, p. 15). Saat ini dengan globalisasi perekonomian dunia yang pesat, modal asing telah dianggap sebagai katalisator pembangunan ekonomi suatu negara.

Walaupun utang luar negeri yang dilakukan negara seringkali memunculkan spekulasi negatif dan menuai sorotan dari pihak tertentu, akan tetapi terdapat beberapa point krusial tentang manfaat dan pentingnya utang luar negeri bagi suatu negara yang terangkum sebagai berikut; (Anwar, 2021):

- (1) Utang luar negeri dapat menghindari *opportunity loss*. Dalam suatu negara terkadang terdapat kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda atau *opportunity loss*. Penundaan pengadaan pembiayaan justru mengakibatkan kerugian besar bagi negara di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan adanya utang luar negeri, pemerintah dapat menghindari *opportunity loss* dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) Utang luar negeri dapat memberikan *legecy* atau warisan aset. Utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat produktif dan memberikan manfaat bagi masa depan negara, misalnya pendanaan dari utang luar negeri untuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan yang bersifat krusial lainnya.
- (3) Utang luar negeri dapat digunakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan berutang yang diproyeksikan oleh sebuah negara dengan tujuan menciptakan pemerataan kemiskinan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia akan membuat suatu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dimasa mendatang.
- (4) Utang luar negeri dapat untuk mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Penerbitan instrumen utang pemerintah merupakan alternatif

investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Instrumen utang pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan dapat menjadi acuan *benchmark* bagi industri keuangan.

4) Pemasaran Barang dan Jasa Internasional

Pertumbuhan perekonomian dunia yang mengarah kepada era globalisasi dewasa ini berdampak kepada semakin tingginya tingkat persaingan bisnis ekonomi negara baik yang beroperasi pada tingkat domestik, regional, maupun internasional. Untuk itu, berbagai strategi bisnis internasional pun telah dirumuskan dengan mengedepankan daya saing yang dimilikinya oleh suatu negara agar tetap eksis dan menguasai pasar internasional. Saat ini, tidak sedikit perusahaan besar yang melebarkan sayap ke ranah internasional dengan strategi yang berfokus pada pemasaran internasional atau strategi kegiatan pemasaran yang berlangsung di lebih dari satu negara (Markey, 2019). Ruang lingkup dalam pemasaran internasional tidak hanya berpusat pada perdagangan dan pemanufakturan internasional saja, tetapi telah berkembang dan meliputi bidang lainnya seperti; konstruksi, transportasi, perbankan, pariwisata, periklanan, dan komunikasi.

Michael E. Czinkota mendefinisikan bahwa kegiatan pemasaran barang dan jasa internasional merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi yang melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran suatu produk/jasa yang dijalankan individu dan organisasi yang terlibat. Sementara Kotabe dan Helsen memiliki pandangan

bahwa pemasaran internasional lebih mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan upaya-upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global (Kumalasari, 2022). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran internasional bertujuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan daya saing sebuah produk di pasar dunia.

Walaupun dalam aktivitasnya kegiatan pemasaran internasional memiliki banyak hambatan, tetapi negara perlu mengaplikasikan konsep pemasaran berskala internasional karena tak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga dapat memberi keuntungan non materi seperti terjalinnya hubungan yang baik antar satu negara dengan negara lain. Adapun empat konsep manajemen dalam pemasaran internasional, sebagai berikut: (Mahanani, 2016)

- (1) *Ethnocentric*: Kegiatan pemasaran yang berorientasi pada domestik market (*home country*), sistem pemasaran ini biasanya akan berfokus melihat standarisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan barang/jasa yang dalam suatu negara.
- (2) *Polycentric*: Kegiatan pemasaran yang berorientasi kepada multidomestik market atau sistem pemasaran yang cakupannya ke berbagai negara-negara tertentu akan berfokus dengan sistem produksi yang bersifat adaptasi dengan menyesuaikan karakteristik dari negara penerima yang akan dituju.
- (3) *Regiocentric*: Kegiatan pemasaran yang berorientasi pada kawasan regional tertentu (misalnya ASEAN, Amerika, Afrika, Eropa, dan lain-

lain). Kegiatan pemasaran ini berfokus pada standardisasi dengan menyesuaikan produk dan jasa yang ada di suatu kawasan regional negara-negara.

- (4) *Geocentric*: Kegiatan pemasaran yang berorientasi pada *global market* dan berfokus melakukan pemasaran ke seluruh negara-negara di dunia. biasanya dilakukan oleh negara yang sudah mampu memproduksi kebutuhan sendiri dengan standardisasi dan adaptasi produk dan jasa yang tinggi.

Berikut uraian tabel perbedaan konsep pemasaran barang dan jasa internasional yang didasarkan atas karakteristik, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Karakteristik konsep pemasaran internasional

KONSEP	KARAKTERISTIK		
	PASAR	BAURAN PEMASARAN	MANAJER
<i>Ethnecentric</i>	Domestik	Standardisasi	Negara Asal
<i>Polycentric</i>	Multidomestik	Adaptasi	Negara lainnya
<i>Regiocentric</i>	Regional	Standardisasi dan adaptasi	Negara-negara yang ada di satu kawasan regional
<i>Geocentric</i>	Global	Standardisasi dan adaptasi	Seluruh negara

Sumber: Estu Mahanani, Universitas Persada Indonesia, 2016

1.4.2 Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

Dalam lingkungan internasional, kebijakan luar negeri merupakan instrumen penting sebuah negara untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan cita-cita negaranya. Ini merujuk terhadap strategi atau perilaku

yang dilakukan negara dalam menjalin interaksi dengan negara lain. Padelford dan Lincoln, mendefinisikan bahwa “Kebijakan luar negeri suatu negara adalah totalitas dari urusannya dengan lingkungan eksternal (AS, 2018). Ini mengacu terhadap hasil keseluruhan dari proses di mana suatu negara menerjemahkan tujuan dan kepentingannya yang dipahami secara luas ke dalam tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya dan mempertahankan kepentingannya.

Kebijakan luar negeri memiliki tujuan yang berfokus pada tiga unsur yakni; 1) adanya gagasan tentang tujuan-tujuan nasional yang akan dicapai, 2) terdapat sumber data yang mampu mendukung pencapaian tujuan; dan 3) memiliki strategi guna meraih tujuan peningkatan ekonomi yang ingin dicapai. Sehingga dalam perumusannya kebijakan luar negeri memerlukan jalinan proses yang rumit dan kompleks yang didasarkan atas serangkaian pertimbangan keputusan oleh elit politik (Rossenau, 2020). Secara sederhana, perumusannya dapat diklasifikasikan dalam beberapa faktor atau biasa disebut dengan determinan kebijakan luar negeri internasional atau eksternal dan determinan domestik atau internal. Berikut uraian determinan eksternal dan internal perumusan kebijakan luar negeri menurut Rossenau (1970):

1) Determinan Internasional atau Eksternal

Lingkungan Internasional dapat memainkan peran dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Bahkan beberapa penstudi HI sepakat bahwa faktor internasional adalah penentu utama munculnya kebijakan luar negeri, hal ini mengacu pada tindakan negara yang tidak pernah terlepas dengan bentuk interaksi dengan negara lain. Adapun secara rinci beberapa

faktor-faktor internasional yang dapat menjadi determinan kebijakan luar negeri sebagai berikut:

- a) **Sistem Internasional atau struktur kekuasaan**, adanya dinamika dari struktur kekuasaan di sistem internasional menuntut negara untuk dapat *survive* terhadap perubahan dalam perumusan kebijakan luar negerinya.
- b) **Hukum Internasional**, adanya seperangkat aturan yang mengatur interaksi negara menjadikan negara mempunyai status, hak, kewajiban serta tanggung jawab yang sama, sehingga aturan hukum dapat menjadi acuan dalam kebijakan luar negerinya.
- c) **Organisasi Internasional**, dalam pandangan konstruktivis organisasi internasional dapat berperan sebagai pengubah perilaku negara atau sebagai aktor independen, sehingga dapat berdampak besar terhadap penentuan kebijakan luar negeri negara anggotanya.
- d) **Aliansi**, sama seperti Organisasi internasional. Aliansi dapat menjadi instrumen pembentukan kebijakan luar negeri karena sifat negara yang melakukan aliansi harus menerima permintaan atau tuntutan dari sekutu mereka, sehingga dapat pula berdampak kepada perumusan kebijakan luar negerinya.
- e) **Kekuatan Senjata Militer**, dalam diplomasi koersif negara yang memiliki kekuatan senjata militer yang kuat akan memiliki kapasitas daya tawar di arena internasional. Karena kekuatan yang dimiliki maka negara-negara ini dapat menentukan kebijakan luar negerinya sendiri tanpa mengikuti sistem dinamika internasional.

2) Determinan Domestik atau Internal

Sama seperti determinan eksternal, determinan internal juga dapat menjadi penentu sifat dan jalannya perumusan kebijakan ekonomi luar negeri. Adapun beberapa faktor-faktor dari lingkungan domestik yang dapat menjadi determinan kebijakan luar negeri sebagai berikut: 1) Sejarah dan Budaya; 2) Geografis dan Populasi; 3) Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 4) Kemampuan Militer; 5) Sistem Politik; 6) Pemimpin negara; 6) Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Lain; 7) Pers dan Opini Publik; 8) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa besarnya efek sektor ekonomi bagi negara ini kemudian menjadikan negara menempatkan sektor ekonomi sebagai pertimbangan utama untuk mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Ini juga mengacu pada determinan domestik/internal dari perumusan kebijakan luar negeri yang menempatkan pembangunan ekonomi nasional dan sumber daya alam sebagai bagian yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diterapkan pada suatu negara (AS, 2018). Sehingga dalam perkembangannya muncul konsep Kebijakan ekonomi luar negeri yang diasumsikan sebagai bagian keputusan dan tindakan negara yang sampai batas tertentu melibatkan hubungan antara satu negara dengan negara lain yang berfokus pada peluang untuk meningkatkan ekonominya.

Dengan ini, kebijakan luar negeri ekonomi pun sama dengan kebijakan luar negeri dengan melibatkan serangkaian tindakan suatu negara, akan tetapi kebijakan ini lebih berfokus pada peningkatan kepentingan-kepentingan

ekonomi seperti ekspor impor, perdagangan, investasi, utang luar negeri, dan lain-lain, bahkan mengaitkan bagaimana sebuah negara dapat berinteraksi dengan aktor global lain untuk meningkatkan ekonomi sebagai acuan utama dalam perumusannya (AS, 2018). Jadi kebijakan ekonomi luar negeri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan kebijakan oleh pemerintah atau suatu negara dengan tujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi atau mendorong pendapatan ekonomi negaranya melalui kegiatan perdagangan internasional.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara berfokus untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran agar tetap stabil terhadap perubahan kas. Kebijakan Namun, seiring perkembangan kebijakan ekonomi suatu negara kian semakin kompleks dengan mengacu pada 3 prinsip dasar, yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Ardiprawiro, 2014) :

1. Kebijakan/tindakan pemerintah yang berfokus pada sektor perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor, misalnya: penetapan tarif, perdagangan bebas, pengadanaan kuota impor – ekspor, serta perdagangan ekonomi bilateral dan multilateral lainnya.
2. Kebijakan pembayaran Internasional yang mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasionalnya, ini mengacu terhadap transaksi yang dilakukan negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, dimana pembayarannya pada umumnya dilaksanakan melalui bank.

3. Kebijakan bantuan luar negeri atau tindakan yang dilakukan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (*grants*), pinjaman/hutang (*loans*), bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan, dll.

Kebijakan ekonomi luar negeri pada prinsipnya mengacu pada tujuan untuk mencapai kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Namun, disisi lain terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan lain dari perumusan kebijakan ekonomi luar negeri yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Autarki**, atau kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan internasional yang dilakukan suatu negara. Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Namun prinsip autarki bermaksud untuk menghindarkan intervensi dari pengaruh ekonomi, politik atau militer negara lain.
2. **Mendapatkan kesejahteraan** (*welfare*), tujuan ini bertentangan dengan autarki di atas. Dengan mengadakan perdagangan internasional suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan meningkat. Maka untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan/restriksi dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota, bea masuk atau bentuk-bentuk pembayaran yang dapat mempersulit alur perdagangan internasional akan dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Secara sederhana, prinsip *welfare* mengarah ke perdagangan bebas.
3. **Proteksi**, tujuannya untuk melindungi industri atau perekonomian dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan dapat berupa penerapan instrument seperti pengadaaan tarif bea masuk atau kuota impor.

4. **Keseimbangan neraca pembayaran**, pada dasarnya negara memiliki tujuan agar nilai transaksi ekspor dan impor dapat seimbang. Hal ini berarti suatu negara tidak menagalam kerugian. Maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa (*exchange control*), yang tidak hanya mengatur/mengawasi lalu lintas tapi juga modal.
5. **Pembangunan nasional**, sudah menjadi tujuan negara-negara berdaulat untuk menjadikan pembangunan nasional sebagai cita-cita nasional yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasional sebagai suatu alternatif dalam kebijakan ekonomi luar negeri yang berfokus pada beberapa aspek, seperti: 1. Perlindungan terhadap industri dalam negeri yang baru tumbuh (*infant-industries*); 2. Kebijakan yang berfokus untuk mengurangi impor barang-barang yang non-esensial dan mendorong impor barang-barang yang lebih esensial; dan 3. kebijakan yang dapat mendorong ekspor agar neraca perdagangan dapat surplus.

1.4.3 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen dan dapat pula menjadi sebab dari perubahan yang menyebabkan timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan dapat menjadi akibat dari adanya variabel bebas pada penelitian. Dalam penelitian ini, Variabel independen yang dimaksud adalah

Kepentingan Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA). Sementara variabel dependen yang dimaksud ialah Pembukaan Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab-Israel. Adapun uraian operasionalisasi variabel sebagai berikut, yakni

Table 1.1 Operasionalisasi Variabel

Variable Dependen	Variable Independen	Kategori	Indikator
Pembukaan Hubungan Diplomatik UEA-Israel	Kepentingan Ekonomi UEA	Kepentingan Ekonomi Dalam Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Ekspor-Impor • Kepentingan Investasi Asing Lngsung ke dalam Negeri (Inbound FDI)
		Kepentingan Ekonomi Dalam Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Investasi Asing langsung ke luar Negeri (Outbond FDI) • Kepentingan Pemasaran Barang dan Jasa Internasional

Sumber: Diolah oleh penulis

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis ialah tipe penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dengan terperinci dan

dijabarkan secara deskriptif analitik. Penggunaan metode kualitatif bertujuan guna mendapatkan penggambaran mengenai teknik dan juga proses terhadap penyelidikan non statistik dalam mengumpulkan data tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan pada makna bukan generalisasi (Abubakar, 2021). Melalui pendekatan kualitatif, penulis akan menjelaskan kepentingan yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri UEA terhadap pembukaan diplomatic Uni Emirat Arab-Israel.

1.5.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data data sekunder. Data sekunder ialah data penelitian yang diperoleh dari sumber literatur dengan topik yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Data tersebut bersumber dari buku, jurnal, artikel, dokumen, situs-situs internet maupun laporan resmi yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Melalui teknik studi kepustakaan, penulis akan mengumpulkan data dari beberapa sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada penelitian penulis. Literatur yang akan digunakan sebagai sumber bacaan berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, berbagai situs di internet maupun laporan resmi yang

berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis data kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang diteliti dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Kemudian, fakta-fakta tersebut akan dihubungkan dengan fakta lainnya agar sebuah argumen yang tepat dapat dihasilkan. Melalui teknik ini pula penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis angka serta data statistik lainnya sebagai penunjang argumen dan hasil akhir penelitian.

1.5.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

1. **BAB 1 Pendahuluan** mencakup latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. **BAB 2 Tinjauan Pustaka** akan mengulas lebih jauh lagi mengenai konsep-konsep ataupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari ulasan tersebut ialah untuk menemukan variabel yang akan memengaruhi kajian yang akan diteliti.
3. **BAB 3 Gambaran Umum** dinamika hubungan UEA dan Israel di Timur Tengah serta memaparkan pembukaan hubungan diplomatic

UEA-Israel di tahun 2020.

4. **BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** pada bab ini operasionalisasi variabel yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menganalisis jawaban serta justifikasi atas pertanyaan penelitian pada rumusan masalah yang telah diangkat.
5. **BAB 5 Kesimpulan** menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan serta memvalidasi kembali asumsi dan hipotesis yang telah diproyeksikan di awal penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Ekonomi Politik Internasional

Seiring dengan perkembangan globalisasi, tatanan nasional dan sistem internasional telah mengalami perubahan yang signifikan. Konsep ekonomi politik internasional perlahan dapat diklaim sebagai hal fundamental dari perumusan kebijakan luar negeri yang paling efektif. Studi tentang ekonomi politik muncul pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas dimana pencetusnya yakni Adam Smith, John Stuart Mill dan Karl Marx, memberi penekanan bahwa politik dan ekonomi tidak beroperasi di bidang yang terpisah, tetapi saling terkait erat (Yanti, 2018). Hal ini didasarkan atas peran ekonomi yang sangat krusial bagi suatu negara, selain dapat memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan meratakan pendapatan diantara berbagai golongan dan lapisan masyarakat, sektor ekonomi juga dapat berperan dalam memberi power bagi eksistensi negara di kancah global, serta menunjang sektor-sektor lain seperti: penguatan teknologi, militer, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Bagi suatu negara ekonomi identik dengan sistem produksi, konsumsi dan distribusi produk dan jasa yang diatur oleh suatu negara. Dalam perkembangannya, ekonomi menjadi satu konsentrasi yang berkorelasi dalam politik internasional suatu negara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara ekonomi dan politik pun terlihat, hal ini ditandai dengan perilaku ekonomi baik secara langsung atau tidak langsung yang semuanya telah diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini, politik berkaitan dengan seperangkat institusi dan aturan yang mengatur interaksi

sosial dan ekonomi. Sementara politik internasional diasumsikan sebagai suatu arena dimana negara akan melakukan *struggle of power* agar dapat *survival* di arena internasional. Adapun sifat negara yang bertanggung jawab dalam mengamankan sektor ekonomi akan menuntut negara untuk melakukan langkah strategis apapun termasuk dengan membangun relasinya negara lain. Sehingga tak hanya menjadi motivasi semata untuk mengamankan power negara, tetapi konsep ini kemudian menjadi doktrin yang memandu pelaksanaan politik luar negeri negara-negara (Colebrook, 2020). Dari sinilah konsep ekonomi politik internasional berkembang yang secara sederhana dapat dipahami sebagai sistem dimana ekonomi dan politik berkorelasi di arena global.

Adam Smith berpandangan bahwa ekonomi politik internasional merupakan "*branch of science of a statesman or legislator*" atau panduan dari pengaturan ekonomi nasional. Sementara Gilpin mengatakan bahwa Ekonomi Politik Internasional merupakan bagian interaksi antara pasar dengan aktor-aktor seperti negara, perusahaan multinasional, individu, hingga organisasi internasional. Dampak umum dari interaksi ini yakni terjadinya kompetisi politik ditingkat internasional, dimana negara yang kuat akan cenderung menjalin lebih banyak menjalin hubungan ekonomi global dalam upaya meningkatkan pendapatan negaranya, sedangkan negara yang lemah berupaya untuk menghilangkan batasan ekonomi ditataran global dalam rangka meminimalisir potensi kerugian yang dapat timbul (Badiri, 2020). Jadi secara keseluruhan, Ekonomi politik Internasional pada dasarnya adalah konsep yang mempelajari bagaimana dinamika pertarungan politik yang terjadi atau terlaksana antara negara kuat dengan negara lemah yang

dalam perkembangannya akan membentuk serangkaian kebijakan ekonomi yang dianut oleh pemerintah negara terkait.

Melalui kajian dari konsep ini akan didapatkan gambaran jelas mengenai munculnya pertentangan antara meningkatkan interdependensi dari ekonomi internasional dengan keinginan suatu negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politiknya karena pada saat yang bersamaan, negara menginginkan keuntungan yang maksimal dari perdagangan bebas yang dilakukan dengan negara lain, sementara disisi lainnya negara juga menginginkan perlindungan bagi otonomi politik, budaya, serta struktur social (Eckhardt, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan negara berjalan melalui logika sistem pasar internasional, di mana pasar diperluas secara geografis dan kerja sama antarnegara di berbagai aspek diperluas melalui mekanisme harga, inilah sistem ekonomi politik internasional.

Kemudian dalam perkembangannya studi ekonomi politik internasional kian memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada interaksi-interaksi yang dilakukan antara aktor-aktor politik internasional, namun lebih kompleks membahas bagaimana metode menambah kekayaan negara. Selain itu, EPI juga membahas metode-metode untuk memperoleh kepentingan nasional suatu negara, relasi interdependensi antar negara, serta rezim-rezim internasional (Eckhardt, 2019). Seperti disampiakan sebelumnya bahwa adapun yang menjadi bahasan dalam kajian ekonomi politik internasional terletak pada pola interaksi aktor-aktor politik dengan pasar. Adanya studi ekonomi tidak mampu menjelaskan isu-isu vital didalam distribusi kekayaan dan pola aktivitas ekonomi internasional,

dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi dunia terhadap kepentingan nasional, dan efektivitas dari rezim-rezim internasional yang kini ada.

Robert Gilpin (1987) dalam melihat tatanan EPI turut memberikan argumen bahwa dalam penerapannya EPI akan melakukan penyesuaian dengan dinamika dalam evolusi ekonomi dunia. Hal ini terlihat dari adanya unifikasi dan efisiensi pasar dunia yang meningkat akibat penentuan harga serta faktor produksi yang merupakan hasil dari adanya persaingan pasar dan responsifitas aktor ekonomi. Selain itu, globalisasi juga turut berperan dengan sistem pasar internasional dengan menawarkan kemudahan sistem transaksi antar negara dengan mengesampingkan batas-batas yang ada. Dinamika sistem pasar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti struktur masyarakat, kerangka politik tingkat nasional, dan internasional, serta perkembangan teknologi. Namun pasar cenderung dapat mentransformasikan hal-hal tersebut kearah yang lebih baik, seperti penghapusan struktur kelas dalam masyarakat, menjadi stimulant perkembangan teknologi, serta dapat mengubah hubungan politik antar negara kearah yang lebih baik (Eckhardt, 2019). Sehingga tatanan dalam EPI akan selalu berkesinambungan dengan sistem pasar internasional yang telah menjadi komponen dan faktor besar dalam membentuk masyarakat modern.

Terdapat tiga pendekatan utama untuk memahami tatanan yang terdapat dalam Ekonomi Politik Internasional menurut Gilpin, yaitu teori Dualism Ekonomi, teori *Modern World system* (MWS), dan teori Stabilitas Ekonomi. Ketiga pendekatan tersebut merupakan wujud transformasi dari teori-teori dasar dalam EPI

yaitu Liberalism, marxisme, dan merkantilisme (Gilpin, 1987). Berikut penjabaran dari teor-teori dasar Ekonomi Politik Internasional menurut Gilpin:

- Teori Dualisme Ekonomi, teori ini menganalisis dinamika dalam sistem ekonomi dengan sektor-sektor tradisional. Teori dualisme ekonomi ini menganalisis tentang bagaimana proses perkembangan ekonomi baik dalam tataran domestik maupun internasional melalui intensifikasi kerjasama dan transformasi perekonomian dari sektor tradisional menuju sektor modern yang dicapai negara melalui modernisasi dari 3 struktur yakni ekonomi, sosial, dan politik. Dualisme ekonomi juga berusaha untuk melihat dua sektor ekonomi yang berbeda secara mendetail, yaitu sektor tradisional yang identik dengan swasembada lokal dan sektor modern yang digambarkan melalui efisiensi produksi serta integritas ekonomi negara-negara. Teori ini juga dalam perkembangannya berasumsi bahwa sektor ekonomi modern yang terhubung satu sama lain di dunia berperan untuk membantu sektor yang terbelakang agar mampu lebih adaptif dalam menghadapi persaingan pasar global. Hal tersebut berarti modernisasi dan efisiensi merupakan kata kunci dari teori ini. Hal ini dikarenakan adanya paham dari nilai-nilai liberalism klasik, maka teori dualisme memandang individu sebagai aktor utama dalam pasar bebas, mengakibatkan tingginya tingkat kompetisi yang diakibatkan oleh faktor kebebasan dan keterbukaan aktivitas ekonomi dapat menjadi ciri khas dari teori ini untuk mendorong aktor-aktor agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan dan kondisi pasar internasional.

- Teori *Modern World System*. Teori ini secara umum berpandangan bahwa di dalam sistem internasional terdapat struktur hierarki yang terdiri atas kelompok negara maju atau *core* yang memiliki kapabilitas produksi, negara *periphery*, yakni kelompok negara miskin yang tidak memiliki sistem produksi dan juga *semi periphery* yaitu kelompok negara menengah yang memiliki karakter gabungan antara *core* dan *periphery*. *Modern World System* juga menguraikan bahwa di era kontemporer ini, pasar internasional sengaja dikonstruksikan sebagai sarana eksploitasi yang dilakukan oleh negara *core* terhadap negara *periphery*.
- Teori Stabilitas Hegemoni. Dalam perkembangannya teori ekonomi ini mengacu pada satu titik terang bahwa dalam tatanan EPI terdapat signifikansi tersendiri dari pengaruh hegemoni, terutama Amerika Serikat yang menggagas adanya teori *Bretton Woods System*. Konsep ini dalam perkembangannya menjadi semakin dinamis hingga membawa para akademisi dalam satu titik bahwa tatanan dalam EPI memiliki signifikansi tersendiri dari pengaruh hegemon, yakni Amerika Serikat untuk menggagas *Bretton Woods System*. Diawali dari dinamika perekonomian dunia yang memburuk pasca Perang dunia II membuat AS membentuk 3 institusi internasional yang berperan penting melihat dinamika Ekonomi Politik Internasional, yaitu: *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, serta *General agreement on Tariffs and Trade* (GATT) atau yang saat ini dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO). IMF dibentuk untuk mengatur nilai tukar dan pembayaran yang terjadi antar negara, sedangkan *World Bank* bertindak menjadi stimulan kapital bagi investasi internasional, dan

GATT melayani negosiasi serta forum untuk mengurangi tarif dan baatasan dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan paparan ini, dapat disimpulkan bahwa baik dalam kajian teori maupun realitas yang ada, terdapat tatanan EPI yang dipengaruhi oleh dinamika sistem pasar global dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi politik internasional merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan intenasional. Pandangan ini membawa implikasi bahwa teori ekonomi politik internasional bukanlah teori ekonomi murni, dalam artian membahas isu-isu ekonomi melulu secara teknis dan melihat dimensi ekonomi yang sekedar bersifat politis. Namun lebih dari itu, teori ekonomi politik internasional berfungsi untuk menjelaskan berbagai kait mengait antara faktor-faktor ekonomi dan politik, pasar dan negara, dalam lingkungan internasional. Sebagaimana diketahui, semenjak Revolusi Industri abad 16 aspek ekonomi dari sistem internasional memiliki kekuatan dominan. Kebutuhan akan adanya bahan mentah, pasar, tenaga kerja, sumber energi, serta teknologi, menjadikan penerapannya dalam politik internasional menjadi semakin besar (Frieden & Lake 1991: 4).

Apalagi setelah Perang Dunia II di mana muncul persaingan antara blok Barat yang liberalis-kapitalis dan Timur yang sosialis-komunis, yang bukan hanya berbentuk persaingan ideologi politik secara tajam, tetapi juga haluan ekonomi. Kendati masalah-masalah yang muncul untuk sebagian adalah masalah ekonomi, namun hakikatnya mempengaruhi sistem politik internasional. Karena itu,

kemudian muncul pelembagaan sistem ekonomi internasional penunjang untuk mengatur tatanan ekonomi internasional dalam bentuk munculnya organisasi-organisasi kerjasama internasional, seperti: PBB, ASEAN, APEC, IMF, *World Bank*, GATT, OPEC dan lain-lain

2.2 Konsep Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

Sejak berakhirnya perang dunia I dan II, sistem internasional telah menyaksikan perkembangan negara-negara yang awalnya bersifat individual, kini harus menjalin sebuah diplomasi, relasi, dan kerjasama dengan dengan negara lain guna memenuhi kepentingan negaranya. Didukung dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations* dan proses dekolonisasi yang memberi kebebasan negara-negara berdaulat untuk menciptakan hubungan timbal balik dengan negara lain (AS, 2018, p. 1). Sehingga negara harus mengusung sebuah kebijakan yang berorientasi pada strategi, keputusan, dan interaksi antar negara.

Kemudian dalam perkembangannya, berbagai negara pun kian menghadapi berbagai perkembangan bentuk ekonomi. Menurut Henry Thompson dalam buku *International Economics: Global Markets and International Competition*, kebijakan ekonomi luar negeri merupakan hal yang menggambarkan dan memprediksi produksi, perdagangan, dan investasi lintas negara. Bidang ini terdiri dari banyak topik termasuk nilai tukar internasional dan aliran moneter; perdagangan bebas; sengketa perdagangan; imigrasi dan migrasi; peraturan pelayaran, biaya dan perannya dalam arus perdagangan; rezim pajak antara struktur dan bagaimana mereka mempengaruhi keputusan

perdagangan (Hughes, 2020). Kenyataan ini dapat dilihat dalam bidang perdagangan domestik, regional dan internasional yang memaksa negara secara esensial untuk terlibat memberi arah dan tujuan dengan merumuskan secara spesifik atau membentuk strategi agar peningkatan ekonomi negaranya dapat tercapai, sehingga sebuah konsep kebijakan luar negeri yang berorientasi pada sektor ekonomi atau kebijakan ekonomi luar negeri pun tercetus.

Sehingga secara umum kebijakan ekonomi luar negeri dapat disimpulkan adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, melalui kegiatan yang mendorong perdagangan internasional, peningkatan investasi dan kerjasama dengan negara lain atau organisasi ekonomi internasional. Keseluruhan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh komposisi, arah serta bentuk tindakan antara satu negara dengan negara lain (Hughes, 2020). Karena sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tapi secara langsung atau tidak langsung kerap berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi luar negeri seperti ekspor impor, utang luar negeri, pemasaran internasional, dan kegiatan ekonomi internasional lainnya.

Sama seperti kebijakan luar negeri pada umumnya, kebijakan ekonomi internasional juga memiliki instrument-instrumen yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni sebagai berikut; Kebijakan Tarif (*Tarif Barrier*) dan Non-Tarif (*Non-Tariff Barrier*), Kebijakan Ekspor, Kebijakan Impor, dan Kebijakan Perdagangan lainnya (Politik Proteksi, Politik Dagang

Bebas, dan Politik Autarki) . Berikut penjabaran dari kebijakan ekonomi luar negeri yang diterapkan oleh suatu negara (Ardiprawiro, 2014) :

1. Kebijakan Tarif (*Tariff Barriers*) dan Non Tarif (*Non-tarrir Barriers*)

Tarif Barrier adalah suatu kebijakan proteksionisme berupa pembebanan pajak terhadap barang-barang impor. Tujuan dari penerapan kebijakan ini didasarkan atas beberapa alasan, seperti; Memperbaiki dasar tukar (*terms of trade*), Melindungi perusahaan domestik dari persaingan industri luar negeri, Melindungi tenaga kerja domestik (*Employment*), Menjadikan harga atau biaya barang impor sama dengan barang domestik (anti dumping), Memperkecil defisit neraca pembayaran (diversifikasi), Memperbaiki syarat-syarat perdagangan, serta Mendorong kemapanan dan efisiensi domestik. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, *Tarrif Barrier* dilakukan suatu negara dengan pengenaan bea masuk atau pembebanan pajak terhadap barang-barang yang datang dari negara lain. Kebijakan *tarif barrier* memiliki 3 golongan yakni sebagai berikut:

- a) Bea ekspor (*Export duties*), merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut ke negara lain. Jadi pajak ini dikenakan untuk barang-barang yang keluar dari costum area suatu negara yang memungut pajak. Costum area adalah daerah dimana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Batas costum area ini biasanya sama dengan batas wilayah suatu negara, tetapi kesamaan ini bukan suatu keharusan, misalnya adanya costum union yang merupakan costum area yang daerahnya meliputi lebih dari satu wilayah negara. Costum area disini lebih luas daripada wilayah suatu negara.

Tetapi dengan adanya free trade area maka costum area lebih sempit daripada batas wilayah suatu negara.

- b) Bea transito (*transit duties*), Merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa tujuan akhir dari barang tersebut adalah negara lain.
- c) Bea Impor (*impor duties*) Merupakan pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk dalam costum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Sementara itu, terdapat pula kebijakan *Non Tarrif Barrier* atau hambatan non tarif yang memiliki tujuan sama dengan *Tarrif Barrier* namun berbeda dalam penerapannya. *Non Tarrif Barrier* atau hambatan non tarif merupakan berbagai kebijakan yang bukan tarif bea masuk dimana yang dilakukan suatu negara dengan maksud untuk menghalangi masuknya produk impor. Kebijakan ini ditujukan dengan berbagai alasan ekonomi, seperti: Melindungi lapangan kerja domestik., Melindungi konsumen, keamanan maupun lingkungan domestik, Melindungi industri baru., dan ebagai reaksi pembalasan yang dilakukan negara. Berikut penjabarannya tujuan dari *Non-Tarrif Barrier* (Nasruddin, 2022a) :

- a) Melindungi lapangan kerja domestik. Saat ini akibat tingginya impor kerap kali mengintensifkan persaingan dan menimbulkan ancaman melemahnya industri dalam negeri. Akibatnya, ketika tidak dapat bersaing, industri akan mati yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang akan menambah volume pengangguran di dalam negeri. Sehingga diperlukan adanya regulasi yakni membatasi masuknya produk lain atau impor terhadap suatu negara.

- b) Melindungi konsumen, keamanan maupun lingkungan domestik. Kebijakan ini ditujukan untuk membatasi impor untuk produk-produk yang membahayakan dan tidak memenuhi standar domestik. Misalnya, produk tersebut berdampak negatif bagi kesehatan konsumen atau mencemari lingkungan domestik. Begitu juga, industri pertahanan seringkali menikmati tingkat perlindungan yang signifikan karena strategis bagi keamanan nasional.
- c) Melindungi industri baru. Dengan membatasi impor, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi tekanan persaingan bagi industri baru (*infant industry*). Dengan begitu, industri tersebut dapat tumbuh, mencapai tahap matang, dan lebih kompetitif di pasar internasional.
- d) Sebagai reaksi pembalasan. Pemerintah memproteksi dari persaingan tidak adil oleh negara mitra. Ketika negara mitra memberlakukan hambatan, maka negara juga perlu berkepentingan untuk menerapkan kebijakan dengan langkah serupa.

2. Kebijakan ekspor

Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya "*Hukum Ekspor Impor (2014)*" ekspor merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan mengeluarkan barang dari negara tertentu dan mengirimkannya ke negara lain, kegiatan perdagangan internasional ini memiliki serangkaian kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini dilakukan supaya tujuan dari pembuatan kebijakan ekonomi internasional suatu negara dapat tercapai (Putri, 2021). Adapun beberapa regulasi-regulasi kegiatan ekspor dalam kebijakan internasional, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pemberian subsidi ekspor. Kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekspor kerap ditandai dengan adanya subsidi harga suatu komoditi yang akan diperdagangkan dengan diperendah biayanya sehingga produk dan jasa tersebut dapat bersaing dalam pasar dunia internasional. Subsidi diberikan untuk meningkatkan atau memajukan ekspor. Subsidi ini bisa dalam bentuk pembebasan pajak, pemberian fasilitas, pengurangan biaya produksi atau lainnya. Tujuan subsidi ini ialah supaya produk ekspor bisa memiliki daya saing di negara tujuan. Subsidi ekspor dapat berupa bentuk pembayaran langsung, pinjaman berbiaya rendah, keringanan pajak untuk eksportir, atau iklan internasional yang dibiayai pemerintah. Hal tersebut berkontribusi untuk mengurangi biaya operasi dan memungkinkan harga produk domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Tujuan utama subsidi adalah merangsang ekspor. Ketika ekspor meningkat, industri dalam negeri dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menghasilkan lebih banyak pendapatan.
- b) Penetapan prosedur ekspor. Sebelum melakukan ekspor, tentu negara eksportir (negara yang melakukan ekspor) harus melakukan beberapa prosedur tertentu. Hal ini berkaitan dengan prosedur dan tata pengurusan pengiriman barang negara tujuan dapat berbeda sesuai penetapan bea cukai masing-masing negara, tidak hanya itu, terdapat pula administrasi dokumen spabean sebagai syarat ketentuan perdagangan internasional seperti *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, *manifes*, dan dokumen lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan negara asal maupun tujuan (Kemenkopukm, 2022). Sehingga Dalam

hal ini, pemerintah memberlakukan kebijakan yang dapat mempermudah bisa mempermudah alur ekspor agar produk dapat bersaing di pasar internasional.

- c) Dumping Adalah kebijakan penetapan harga barang ekspor lebih murah dibanding di dalam negeri. Dengan arti lain, dumping merupakan kebijakan menjual hasil produksi di luar negeri lebih rendah dari di dalam negeri. Biasanya kebijakan ini diterapkan apabila pemerintah dapat mengendalikan harga barang di dalam negeri terlebih dahulu.
- d) Larangan ekspor, Merupakan kebijakan pelarangan untuk mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasan pelarangan ini bisa karena ekonomi, politik, sosial ataupun budaya. Contohnya larangan ekspor minyak bumi, barang bersejarah, kayu ataupun lainnya.
- e) Diskriminasi harga, Artinya barang ekspor ditetapkan dengan harga yang berbeda untuk tiap negara. Biasanya hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalnya negara A mengekspor pakaian ke negara B dengan harga murah, sedangkan pakaian yang diekspor negara A ke negara C tergolong relatif mahal.
- f) Politik dagang bebas, Pemerintah memberikan kebijakan untuk bebas melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kebebasan ini diharapkan nantinya bisa membawa beberapa keuntungan, contohnya mendapat barang produksi berkualitas tinggi atau barang yang harganya lebih murah.

3. Kebijakan Impor

Kegiatan impor dalam perdagangan internasional merupakan sebuah aktivitas yang dapat membantu negara mendapatkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh negara, perusahaan, maupun

perseorangan dengan berbagai tujuan seperti memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan neraca pembayaran, mengurangi pengeluaran devisa pada negara lain serta untuk meningkatkan potensi pada suatu negara untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern (CNBC Indonesia, 2022). Walaupun aktivitas impor menciptakan manfaat yang besar bagi suatu negara, namun disisi lain terdapat kebijakan yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Adapun kebijakan-kebijakan impor dalam kebijakan ekonomi internasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Kuota impor.** merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang, dimana terdapat ketentuan jumlah yang boleh diimpor, tidak diperbolehkan melebihi jumlah maksimal. Pemberlakuan kebijakan kuota impor dalam jangka waktu tertentu ini lahir dari kenyataan bahwa kerap komoditi impor justru lebih menguasai pasar domestik, dan berimplikasi logis pada melemahnya produksi dalam negeri.
- 2. Pengeanaan bea masuk.** Kebijakan ini berupa pembebanan pajak atas barang-barang impor atau barang yang masuk dari negara lain dengan biaya yang telah ditentukan. Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan agar sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa dapat meningkat.
- 3. Pengendalian devisa. Dalam penerapannya, pengendalian subsidi dalam kebijakan ekonomi internasional ditrandai dengan pembatasan jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor sehingga importir harus**

membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli karena devisa merupakan aset kewajiban finansial yang digunakan dalam interaksi internasional

4. **Subsidi.** Dalam kebijakan perdagangan bebas, beberapa barang impor memiliki harga yang lebih murah dibanding harga dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi kepada harga barang dalam negeri agar lebih murah. Bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen adalah dengan memberikan harga biaya produksi yang lebih murah.
5. **Larangan impor** Kebijakan ini berlaku untuk beberapa barang yang dianggap dapat membahayakan lingkungan masyarakat seperti impor senjata api. Pelarangan impor ini juga bertujuan untuk menghemat devisa negara.
6. **Devaluasi** Merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan sengaja. Devaluasi menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga akan mengurangi pembelian barang impor.

4. Kebijakan perdagangan lainnya

- 1) Politik Proteksi, merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (*Infant Industry*) dan persaingan-persaingan barang-barang impor negara yang berkompeten maju. Tujuan kebijakan ini ialah: Memaksimalkan produksi dalam negeri; Memperluas lapangan kerja; Memelihara tradisi nasional dalam negeri; Menghindari negara dari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan; serta menjaga stabilitas nasional yang akan terganggu jika bergantung pada perdagangan negara lain.

2) Politik Dagang Bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor dengan mengadakan perdagangan bebas antarnegara baik secara bilateral maupun multilateral (Kastori, 2022). Kebijakan ini memiliki keunggulan dimana setiap negara yang menerapkan perdagangan bebas akan memungkinkan peningkatan ekspor serta berspesialisasi dalam memproduksi barang dimana suatu negara memiliki keunggulan komparatif.

3) Politik Autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Itu seorang importir dalam melaksanakan pembayarannya harus membeli uang dolar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, kemudian ditransfer kepada eksportir di Amerika.

Kebijakan ekonomi internasional hadir bukan tanpa tujuan, hal ini untuk melindungi kepentingan industri dan produksi dalam negeri serta melindungi kondisi ekonomi nasional dan menghindarkan dari pengaruh buruk (Wahyuni, 2022). Selain itu, kebijakan ekonomi internasional bertujuan untuk melindungi lapangan pekerjaan, menjaga nilai tukar agar tetap stabil, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini belum pernah dikaji oleh

peneliti lainnya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, penulis membuktikan dengan penelitian terdahulu. Adanya penelitian terdahulu menjadi salah rujukan bagi peneliti sebagai pedoman dalam mengerjakan skripsi sehingga mempermudah proses penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, yakni penelitian yang dilakukan oleh Raden Mas Try Ananto Djoko Wicakson tahun 2020 yang berjudul “Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel”, Penelitian Yulia Rimapradesi tahun 2019 yang berjudul “Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel”, Penelitian Fahmi Safan Al Husna yang berjudul “Kepentingan Arab Saudi Terhadap Israel Dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Israel-Arab Saudi”, penelitian Mohammad Alief Anshary yang berjudul “Peran Amerika Serikat Terhadap Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dengan Negara-Negara Timur Tengah” dan penelitian Ahmad Mudhofarul Baqi yang berjudul *“From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations.*

Penelitian Raden Mas Try Ananto Djoko Wicakson yang berjudul “Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel” di tahun 2020 berfokus meneliti latar belakang munculnya kebijakan UEA dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tahun 2020. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan realpolitik, penelitian ini mengemukakan pertimbangan utama yang mendasari terjalannya kesepakatan normalisasi hubungan oleh kedua negara tidak terlepas dari kepentingan

nasional yang hendak dicapai UEA karena adanya ancaman keamanan dari negara tetangganya yakni Iran. Oleh karenanya, UEA mencari strategi dengan membuka aliansi dengan negara yang dianggap mampu membantunya melawan Iran dan memiliki posisi kuat di Kawasan Timur Tengah, yakni Israel. Wicaksono juga mengemukakan bahwa dalam normalisasi hubungan ini, Israel juga memiliki kepentingan yang besar terhadap UEA karena pengakuan dunia internasional terhadap UEA. Penelitian ini juga berfokus mengemukakan respon negara-negara yang mendukung ataupun menolak adanya normalisasi karena Isu Palestina. Sementara UEA tetap menerapkan kebijakan luar negerinya dengan melanjutkan kerjasama yang telah dibangun bersama Israel diatas kepentingan nasionalnya.

Selanjutnya, Penelitian Yulia Rimapradesi (2019) yang berjudul, “Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel” mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor krusial yang menyebabkan negara Arab yakni, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko dapat membuka hubungan diplomatik terhadap Israel. Dalam penelitiannya, ditemukan hasil bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda yang mendasari keempat negara Arab tersebut dapat menormalisasikan hubungannya dengan Israel. Dari teori *rational choice* yang digunakan penulis berfokus melihat pola perilaku sosial dan perspektif dari keempat negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) dalam melihat prospek jalinan normalisasi kedepannya yang dipengaruhi karena faktor kedekatan geografis dengan Israel sehingga

dianggap ideal dalam melakukan kerjasama di berbagai bidang, khususnya ekonomi, militer, dan teknologi. Peneliti juga menjelaskan bahwa setiap hubungan diplomatik yang terbangun tidak terlepas dari peran Amerika Serikat.

Kemudian terdapat penelitian dari Fahmi Safan Al Husna yang mengangkat judul “Kepentingan Arab Saudi Terhadap Israel Dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Israel-Arab Saudi pada Tahun 2018”. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan interdependensi, penelitian ini berfokus pada prospek kepentingan ekonomi antara Arab Saudi-Israel yang merupakan upaya perwujudan visi Arab Saudi 2030 untuk mendongkrak ekonomi dan mengintegrasikan hubungan Arab Saudi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan membangun mitra-mitra strategis yang menguntungkan bagi Arab Saudi. Dari penelitian ini dikemukakan bahwa, Arab Saudi membutuhkan jalinan kerjasama dengan Israel berupa pembangunan jalur kereta api untuk mempermudah akses distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan perekonomiannya. Israel merupakan negara yang dianggap ideal karena dikenal sebagai negara penghasil teknologi canggih dan kuat dalam bidang ekonomi sehingga mampu menunjang cita-cita Arab Saudi dalam pembangunan infrastruktur jalur kereta api.

Penelitian Mohammad Alief Anshary tahun 2021 dengan judul “Peran Amerika Serikat Terhadap Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel dengan Negara-negara Timur Tengah” yang berfokus pada peran dan bagaimana negara adidaya Amerika Serikat menancapkan hegemoninya dalam membantu normalisasi hubungan antara Israel dengan negara Arab. Dengan konsep

normalisasi dan hubungan diplomatik yang digunakan, penelitian ini mengemukakan bahwa Amerika Serikat telah banyak menggunakan kebijakan politik luar negerinya dalam normalisasi Israel dan negara Arab yang terbentuk. Amerika Serikat memanfaatkan dinamika kawasan Timur Tengah dengan kebijakan diplomasi segitiga sembari mengakomodir kepentingan negara Arab sebagai tawaran dalam kesepakatan tersebut. Hasilnya, kedua negara tersebut resmi melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui perjanjian Abraham Accords pada tahun 2020 yang menandai keberhasilan politik luar negeri Amerika Serikat dalam politik internasional.

Selanjutnya penelitian terbaru dari Ahmad Mudhofarul Baqi di tahun 2022 yang berjudul *“From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations”*. Penelitian ini mengemukakan alasan UEA menormalkan hubungannya dengan Israel melalui Kesepakatan *Abraham Accord* yang bertentangan dengan posisi UEA sebagai bagian dari anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan Liga Arab yang telah lama berkonflik di Israel, karena pencaplokan Israel atas Palestina. dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa terdapat konteks sosial antara konflik Iran yang dianggap ancaman oleh UEA sehingga membuat UEA lebih memilih normalisasi hubungannya dengan Israel. Selain itu, tipe identitas UEA sebagai negara Ibrahim (terdiri dari agama Islam, Yahudi, dan Kristen) turut menjadi faktor pendukung hubungan UEA-Israel. Sehingga dengan pemikiran konsep konstruktivisme yang digunakan penulis diprediksi bahwa kedua negara akan mampu membangun sikap kolektif kedepannya walaupun memiliki sejarah yang kurang baik.

Berikut ini tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

JUDUL TULISAN	TUJUAN	TEORI	HASIL PENELITIAN
<p>Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungannya Dengan Israel oleh Raden Mas Try Ananto Djoko Wicakson (2020)</p>	<p>Mengetahui kebijakan luar negeri yang diterapkan UEA terhadap normalisasi hubungannya dengan Israel</p>	<p>Kepentingan Nasional & Realpolitik</p>	<p>Penelitian ini, menyimpulkan bahwa pertimbangan utama yang mendasari terciptanya normalisasi hubungan antara UEA-Israel yakni karena adanya ancaman keamanan UEA dari Iran yang semakin nyata di kawasan Teluk Arab. Oleh karena itu, untuk menghindari dilemma keamanan, UEA mencoba membangun aliansi dengan negara-negara yang dianggap kuat di Kawasan Timur Tengah termasuk Israel. Penelitian ini juga berfokus mengemukakan respon negara-negara yang mendukung ataupun menolak adanya normalisasi karena Isu Palestina. Sementara itu, UEA tetap menerapkan</p>

			kebijakan luar negerinya dengan melanjutkan kerjasama yang telah dibangun bersama Israel.
<p>Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan Dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan Dengan Israel oleh Yulia Rimapradesi (2019)</p>	<p>Menganalisis kepentingan-kepentingan yang mendasari negara Arab dalam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel</p>	<p><i>Rational Choice</i></p>	<p>Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda yang mendasari keempat negara Arab tersebut dapat menormalisasikan hubungannya dengan Israel. Peneliti kemudian mengemukakan bahwa mayoritas kepentingan keempat negara (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) dipengaruhi karena faktor kedekatan geografis dengan Israel sehingga dianggap ideal dalam melakukan kerjasama dibidang ekonomi, militer, dan teknologi. Peneliti juga menjelaskan bahwa hubungan diplomatik yang terbangun dari keempat</p>

			negara tidak terlepas dari peran Amerika Serikat.
<p>Kepentingan Arab Saudi Terhadap Israel Dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Israel-Arab Saudi Pada Tahun 2018 oleh Fahmi Safan Al Husna (2018)</p>	<p>Menganalisis kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api yang mendasari Arab Saudi terhadap kerjasama yang dibangun bersama Israel</p>	<p>Kepentingan Nasional Interdependensi</p>	<p>Kepentingan oleh Arab Saudi terhadap pembangunan jalur kereta api Israel-Arab Saudi pada tahun 2018 adalah upaya mewujudkan visi Arab Saudi 2030 dalam mendongkrak ekonomi dengan membuka gerbang logistik yang khas di kawasan Timur Tengah dan mengintegrasikan hubungan Arab Saudi dengan negara-negara di kawasan regional dan internasional. Arab Saudi memiliki kepentingan terhadap Isarel yang dianggap sebagai negara penghasil teknologi canggih dunia yang dapat memudahkan proses pembangunan jalur kereta api yang diharapkan.</p>
<p>Peran Amerika Serikat Terhadap Normalisasi Hubungan</p>	<p>Memberi indikator peranan dan kebijakan yang</p>	<p>Normalisasi Hubungan Diplomatik</p>	<p>Dalam normaliasasi Hubungan Diplomatik Israel-Negara Timur Tengah, Amerika Serikat</p>

<p>Diplomatik Israel Dengan Negara-Negara Timur Tengah Oleh Mohammad Alief Anshary (2021)</p>	<p>diterapkan Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara di Timur Tengah</p>		<p>memiliki peran dalam memberikan fasilitas perdamaian dan mengusung perjanjian “<i>Abraham accords</i>” sebagai kesepakatan kalaborasi antara Israel-negara Arab yang saling menguntungkan. AS juga turut terlibat memberikan bantuan kepada negara-negara yang menjalin normalisasi hubungan dengan Israel. Hal tersebut yang tidak terlepas dari kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah.</p>
<p>“<i>From Foes to Friends: The Normalization of the United Arab Emirates Arab and Israel Relations</i>” oleh Ahmad Mudhofarul Baqi (2022)</p>	<p>Memberi indikator lain dari faktor-faktor pendukung terjalannya normalisasi hubungan UEA-Israel Terlepas dari keanggotaan UEA sebagai negara Arab, anggota</p>	<p><i>Constructivism</i></p>	<p>Penelitian ini mengemukakan alasan UEA menormalkan hubungannya dengan Israel. Pertama, dari konteks sosial yakni adanya konflik bersama Iran yang dianggap ancaman oleh UEA sehingga UEA perlu mencari negara yang dapat membantunya.</p>

	<p>Liga Arab, GCC, serta partner Plaestina</p>		<p>Kedua dari konsep konstruktivisme yang digunakan, UEA menyadari potensi Israel yang dapat memenuhi kebutuhan UEA di berbagai bidang. Sehingga sejarah konflik rumit diantara kedua negara bukanlah penghalang bagi UEA-Israel dalam membangun masa depan bagi kepentingan negara masing-masing.</p>
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis